

**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 73 TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN PADA
INDUSTRI PENGOLAHAN DI INDONESIA**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana



ERLIANA SOFIATI

3118 30591

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 73 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN PADA INDUSTRI PENGOLAHAN DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ERLIANA SOFIATI

No Induk Mahasiswa: 311830591

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I	Penguji
	
Soegiharto, Dr., M.Acc., Ak., CA.	Julianto Agung Saputro, Dr., S.Kom., M.Si., Ak.
Pembimbing II	
	
Ivana Oktarina Sopacua, SE., M.Si., Ak.	

Yogyakarta, 14 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi PSAK 73 terhadap laporan keuangan dan rasio keuangan pada industri pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Peneliti menggunakan pendekatan retrospektif modifikasian (dengan dampak kumulatif) dalam menerapkan PSAK 73. Dampak implementasi PSAK 73 dianalisis menggunakan pendekatan kapitalisasi sewa Imhoff *et al.* (1991).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 73 berdampak terhadap laporan keuangan maupun rasio keuangan pada industri pengolahan. Total aset, liabilitas, dan ekuitas akan berubah ketika PSAK 73 diterapkan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada rasio D/A, D/E, ROA, dan ROE yang nilainya bervariasi pada setiap perusahaan.

Kata kunci: PSAK 73, industri pengolahan, laporan keuangan, rasio keuangan

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the impact of the implementation of PSAK 73 towards financial statement and financial ratios of manufacturing companies listed in Bursa Efek Indonesia with the financial year of 2018. Researcher uses modified retrospective approach (with cumulative effects) for implementing PSAK 73. The impact of PSAK 73 is analyzed using lease capitalization approach developed by Imhoff et al. (1991).

The result of this research shows that the implementation of PSAK 73 has impact on the financial statement and financial ratios of manufacturing industry. Total assets, liabilities, and equities will change when PSAK 73 being implemented. Those will result in the change of the D/A, D/E, ROA, and ROE ratios, with various rate among companies.

Keywords: PSAK 73, manufacturing industry, financial statement, financial ratios

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

International Financial Reporting Standard (IFRS) adalah standar akuntansi yang dikembangkan dan diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* dan merupakan standar yang diakui secara internasional (IFRS Foundation, 2017). Pada Januari 2016, IASB menerbitkan tiga standar akuntansi baru, yaitu IFRS 9: *Financial Instruments*, IFRS 15: *Revenue from Contracts with Customers*, dan IFRS 16: *Leases*. IFRS 16 yang menggantikan IAS 17 merupakan hasil kerja sama antara IASB dengan *Financial Accounting Standards Board (FASB)*. IFRS 16 lahir dari kesadaran IASB dan FASB akan perlunya pembaruan standar mengenai sewa sebagai respon atas kurangnya transparansi informasi terkait perlakuan sewa dalam aturan sebelumnya yang menyebabkan sebagian besar transaksi sewa tidak tercantum dalam laporan posisi keuangan (*off-balance sheet*).

US Securities and Exchange Commission (SEC) pada tahun 2005 memperkirakan ada sekitar 1.25 triliun USD sewa yang tidak dicantumkan dalam laporan posisi keuangan pada *US public companies*. Sementara itu, IASB (2016) memaparkan bahwa ada kurang lebih 2.860 triliun USD komitmen sewa dari 14.000 *listed companies* di dunia yang tidak tercantum dalam laporan keuangan. IASB dan FASB pun sepakat bahwa penyewa harus mengakui aset dan liabilitas yang muncul dari transaksi sewa yang dilakukannya dan hal tersebut diwujudkan dalam IFRS 16.

Hasil studi yang dilakukan oleh PwC bekerjasama dengan *Rotterdam School of Management* di Belanda mengenai dampak dari IFRS 16 menunjukkan bahwa dampak dari perubahan standar kapitalisasi sewa ini berbeda secara signifikan di setiap industri, dan berbeda antar entitas di dalam suatu industri yang sama. Penelitian tersebut menggunakan sampel 3.199 entitas pada 51 negara di seluruh dunia. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa industri yang rasio keuangan dan kinerjanya paling terdampak oleh IFRS 16 adalah industri *retail, airlines, professional services, health care, textile and apparel*, dan *wholesale* (Tahtah & Roelofsen, 2016).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) selaku penyusun dan penerbit standar akuntansi resmi di Indonesia telah berupaya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk mengkonvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan IFRS, walaupun adopsi tersebut belum dilakukan secara penuh. Konvergensi tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen Indonesia selaku bagian dari forum korporasi ekonomi internasional *The Group of Twenty* (G20) (IAI, 2020). Hasil adopsi IFRS terbaru oleh DSAK IAI adalah PSAK 73 tentang: Sewa yang merupakan konvergensi dari IFRS 16 tentang: *Leases*. PSAK 73 ini diterbitkan pada 18 September 2017 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2020. PSAK 73 mengharuskan penyewa untuk memperlakukan semua sewanya sebagai sewa pembiayaan dan mencantulkannya di laporan posisi keuangan (*on-balance sheet*), sehingga terdapat perubahan akuntansi yang substansial (DSAK IAI, 2017). Berdasarkan adanya perubahan kebijakan akuntansi sewa tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi PSAK 73 untuk mengetahui dampaknya terhadap laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan.

Penelitian di Indonesia yang menganalisis dampak implementasi PSAK 73 diantaranya dilakukan oleh Kurniawan (2018) yang mengambil objek perusahaan *retail* dan oleh Tirani (2018) yang mengambil objek perusahaan jasa penerbangan (*airlines*). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan ke PSAK 73 berdampak pada laporan keuangan maupun rasio keuangan perusahaan. Informasi mengenai dampak kapitalisasi sewa di berbagai industri diperlukan agar perbandingan dampak antar-industri dapat dilakukan (Kurniawan, 2018). Peneliti hendak meneliti cakupan industri lain yang terdampak oleh adanya pembaruan standar mengenai sewa operasi ini guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dari berbagai industri.

Peneliti akan menganalisis pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap industri pengolahan di Indonesia yang *listed* di Bursa Efek Indonesia. Peneliti mengambil industri pengolahan dengan mengacu hasil studi yang dilakukan PwC tahun 2016 yang menunjukkan bahwa satu dari enam industri yang paling terdampak oleh adanya aturan kapitalisasi sewa baru adalah industri *textile and apparel*, yang jika diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2015 termasuk dalam salah satu *sub-code* dari industri pengolahan (*manufacturing industry*). Peneliti hendak memperluas objek penelitian yang tidak sebatas pada *sub-code textile and apparel* saja, tetapi mencakup seluruh *sub-code* dari industri

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengolahan, sehingga gambaran yang lebih lengkap bisa diperoleh. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi mengenai “ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 73 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN PADA INDUSTRI PENGOLAHAN DI INDONESIA.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dari penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan pada industri pengolahan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dari penerapan PSAK 73 terhadap rasio keuangan pada industri pengolahan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan pada industri pengolahan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap rasio keuangan pada industri pengolahan di Indonesia.

Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi guna menambah pengetahuan mengenai analisis dampak PSAK 73.
2. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi industri pengolahan yang menggunakan sewa operasi dalam perusahaannya untuk mengetahui dampak dari perubahan standar akuntansi terbaru yang berlaku pada bisnis mereka.
3. Bagi para pemangku kepentingan
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam menilai dampak PSAK 73 terhadap laporan keuangan serta rasio keuangan perusahaan, khususnya di industri pengolahan.

Kontribusi Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan akuntansi di Indonesia. Hasil analisis mengenai dampak yang ditimbulkan dari penerapan PSAK 73, khususnya pada industri pengolahan, dapat menjadi bahan evaluasi maupun pertimbangan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

TINJAUAN TEORI

Sewa

Sewa adalah persetujuan kontrak untuk jangka waktu tertentu, yang memberikan penyewa hak untuk menggunakan suatu aset tertentu yang dimiliki oleh pesewa (Kieso *et al.*, 2014). Sementara itu, menurut PSAK 30, sewa merupakan suatu persetujuan di mana pesewa mengizinkan penyewa untuk menggunakan asetnya dengan imbalan berupa pembayaran periodik, selama suatu periode tertentu (IAI, 2014). Sewa memperbolehkan perusahaan untuk mengakses dan menggunakan properti maupun peralatan tanpa perlu mengeluarkan kas dalam jumlah besar (dibandingkan dengan pembelian aset), bahkan terkadang menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh hak penggunaan aset (Tahtah & Roelofsen, 2016).

IASB berpendapat bahwa sewa yang memiliki kemiripan dengan *installment purchases* perlu dikapitalisasi (Kieso *et al.*, 2014). Penyewa ketika mengkapitalisasi sewa perlu mencatat aset dan liabilitas yang secara umum besarnya sama dengan nilai kini (*present value*) dari pembayaran sewa.

PSAK 30

PSAK 30 diterbitkan pertama kali pada 27 Juni 2007 dan bertujuan untuk mengatur kebijakan dan pengungkapan terkait sewa. PSAK 30 terakhir direvisi pada 27 Agustus 2014. PSAK 30 mengklasifikasikan sewa dengan memperhatikan kecenderungan besarnya manfaat dan risiko atas aset yang disewa ada di tangan pesewa atau penyewa. Substansi manfaat dan risiko dari suatu transaksi sewa adalah dasar yang digunakan oleh PSAK 30 untuk menentukan klasifikasi. Sewa di dalam PSAK 30 diklasifikasikan menjadi sewa operasi (yang tidak mengalihkan manfaat dan risiko secara substansial) dan sewa pembiayaan (yang mengalihkan manfaat dan risiko secara substansial).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IFRS 16

IFRS 16 telah diterbitkan oleh IASB pada Januari 2016 dan telah diberlakukan mulai 1 Januari 2019. IFRS 16 menggantikan aturan akuntansi sebelumnya, yaitu IAS 17. IAS 17 mengkategorisasi sewa menjadi sewa operasi dan sewa pembiayaan. Hal tersebut, menurut IASB (2016), mengakibatkan investor perlu mengestimasi dampak dari sewa yang tidak tercantum dalam laporan keuangan (sewa operasi), yang kerap kali mengarah pada estimasi berlebih terhadap liabilitas yang lahir dari adanya kontrak tersebut. IASB menerbitkan IFRS 16 sebagai solusi dari permasalahan tersebut dengan mewajibkan pencantuman aset dan liabilitas pada laporan keuangan perusahaan untuk semua sewa. IASB (2016) dalam *bookletnya* yang berjudul *IFRS 16—Effect Analysis* mencoba untuk menganalisis dampak dari adanya aturan sewa baru tersebut. Tabel berikut menyajikan prediksi dampak IFRS 16 terhadap komponen laporan keuangan.

Tabel 2.1. Dampak IFRS 16 terhadap Komponen Laporan Keuangan

Perubahan	Dampak
Pengakuan atas aset yang belum diakui sebelumnya.	Peningkatan aset.
Pengakuan atas liabilitas yang sebelumnya belum diakui.	Peningkatan liabilitas keuangan, yang akan berdampak pada <i>leverage</i> .
Pengakuan atas biaya bunga serta depresiasi, yang menggantikan pengakuan atas biaya sewa operasi.	Peningkatan laba operasi (karena biaya bunga umumnya dikeluarkan dalam perhitungan tersebut).

Sumber: *IFRS 16—Effect Analysis* hal.52 (IASB, 2016)

PSAK 73

PSAK 73 telah diterbitkan oleh DSAK IAI pada 18 September 2017. Aturan sebelumnya, yaitu PSAK 30, mulai 1 Januari 2020 sudah tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh PSAK 73. Interpretasi terkait dengan sewa dalam PSAK 30, yaitu ISAK 23 tentang Sewa Operasi, dan ISAK 25 tentang Hak atas Tanah juga ikut tergantikan dengan terbitnya PSAK 73 ini. PSAK 73 merupakan hasil konvergensi dari IFRS 16. Lingkup dari PSAK 73 adalah semua jenis sewa, kecuali sewa terkait dengan aset biologis, eksplorasi atau penambangan atas sumber daya yang tidak dapat diperbarui, hak perjanjian lisensi, perjanjian konsesi, lisensi atas kekayaan intelektual, serta properti investasi.

Aturan sewa tunggal dalam PSAK 73 mengakibatkan semua sewa perlu diakui pada laporan posisi keuangan dan ditampilkan sebagai aset hak guna dan liabilitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sewa. Namun, ada dua kondisi yang menyebabkan pengakuan tersebut tidak berlaku, yaitu:

1. Sewa jangka pendek, yaitu sewa dengan jangka waktu maksimal 12 bulan dari tanggal permulaan sewa (*inception date*).
2. Sewa dengan nilai aset rendah, dengan kriteria: penyewa memperoleh manfaat atas pemakaian aset dan aset tersebut tidak memiliki keterkaitan yang kuat dengan aset lain. PSAK 73 tidak memaparkan besar kisaran minimal suatu aset sehingga dapat dikatakan memiliki nilai rendah, dan hanya memberikan beberapa contoh seperti: komputer, mebel, dan telepon kantor.

Perlakuan Akuntansi PSAK 73

Peneliti memfokuskan topik bahasan pada perlakuan akuntansi dalam PSAK 73 bagi penyewa karena adanya model akuntansi baru bagi penyewa. Proses pencatatan akuntansi bagi penyewa dalam PSAK 73 terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Pada tanggal permulaan (*commencement date*), aset hak guna serta liabilitas sewa diakui oleh penyewa. Pengukuran awal aset hak guna adalah sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset. Pada pengukuran selanjutnya, aset hak guna ditentukan dengan mengurangkan biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan serta akumulasi dari kerugian penurunan nilai. Sementara itu, pengukuran awal liabilitas atas aset yang disewa adalah sebesar nilai kini pembayaran sewa yang didiskontokan dengan tarif bunga implisit (atau menggunakan tarif bunga inkremental atas pinjaman apabila tidak bisa ditentukan tarif bunga implisitnya). Selanjutnya, liabilitas sewa jumlah tercatatnya disesuaikan dengan pembayaran sewa dan beban bunga yang telah diakui. Saat penyajian, aset maupun liabilitas sewa dapat disajikan terpisah ataupun tidak dengan pos lainnya. Pada saat pengungkapan, penyewa dalam catatan atas laporan keuangannya perlu mengungkapkan beberapa informasi, antara lain beban-beban dan jumlah kas keluar terkait dengan sewa, nilai aset hak guna yang tercatat di akhir periode, pendapatan apabila aset sewaan disubsewakan, serta untung-rugi dari adanya transaksi jual dan sewa balik.

Opsi Transisi PSAK 73

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada saat awal perusahaan menerapkan PSAK 73, akan terjadi perubahan atau transisi dari pencatatan sebelumnya (PSAK 30) ke pencatatan baru (PSAK 73).

PSAK 73 memberikan dua pilihan bagi penyewa terkait dengan hal tersebut, yaitu:

1. Dalam pendekatan retrospektif penuh (opsi 1): informasi komparatif disajikan ulang.
2. Dalam pendekatan retrospektif modifikasian (kumulatif) (opsi 2):
 - a. Informasi komparatif tidak disajikan ulang.
 - b. Dampak kumulatif akan diungkapkan pada awal tanggal penerapan.
 - c. Aset dan liabilitas sewa dari sewa pembiayaan yang telah disajikan sebelumnya sesuai PSAK 30 disajikan kembali dengan jumlah yang sama pada tanggal penerapan awal PSAK 73.
 - d. Aset hak guna dan liabilitas yang timbul dari sewa operasi (pada aturan sebelumnya) harus diakui. Liabilitas dihitung menggunakan tingkat bunga inkremental pada tanggal transisi. Sementara itu, aset hak guna ditentukan dengan dua cara, yaitu sesuai jumlah tercatat aset tersebut (opsi 2a) atau sesuai jumlah liabilitas sewanya (opsi 2b).

Penyewa dapat memilih salah satu dari dua opsi transisi tersebut dalam menerapkan PSAK 73. Penyewa harus menggunakan opsi yang dipilih secara konsisten.

Perbandingan PSAK 30 dengan PSAK 73

Perbedaan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 antara lain dapat dilihat dari segi aturan yang menjadi acuan dalam pembuatan masing-masing PSAK tersebut, fokus atau hal yang ditekankan dalam menilai apakah suatu aset merupakan aset sewa, serta perbedaan dalam hal klasifikasi jenis sewa dan pengungkapannya masing-masing. Berikut peneliti sajikan secara ringkas perbandingan antara dua aturan tersebut.

Tabel 2.2. Perbandingan PSAK 30 dengan PSAK 73

Kategori	PSAK 30	PSAK 73
Acuan	IAS 17	IFRS 16
Fokus	Substansi atas perpindahan manfaat dan risiko	Hak untuk mengontrol/menggunakan aset
Klasifikasi (khusus untuk penyewa, untuk pesewa tidak berubah)	Sewa operasi dan sewa pembiayaan	Sewa pembiayaan (dengan pengecualian)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengungkapan	Aset dan liabilitas sewa untuk sewa pembiayaan, dan biaya sewa untuk sewa operasi	Aset hak guna dan liabilitas sewa untuk semua sewa
--------------	---	--

Sumber: data diolah dari PSAK 30 (IAI, 2014) dan PSAK 73 (IAI, 2017)

Rasio Keuangan

Berbagai pihak (manajer, pemilik, kreditor, investor, dan agensi pemerintah) membuat keputusan bisnis dengan menggunakan informasi dari laporan keuangan (Price *et al.*, 2012). Pihak-pihak tersebut menginginkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan hal tersebut dapat digambarkan melalui analisis rasio (Maxwell, 1990). Price *et al.* (2012) mengartikan analisis rasio sebagai suatu hubungan antara berbagai macam *item* dalam laporan keuangan.

Jusup (2011) menyebutkan bahwa likuiditas, profitabilitas, serta solvabilitas merupakan tiga analisis utama laporan keuangan. Price *et al.* (2012) menyatakan pentingnya likuiditas untuk mendemonstrasikan kemampuan membayar utang yang mampu membangun kredibilitas keuangan perusahaan. Sementara itu, profitabilitas dapat menggambarkan kekayaan suatu perusahaan (Price *et al.*, 2012). Selanjutnya, solvabilitas menggambarkan ketahanan perusahaan dalam jangka panjang (Jusup, 2011).

Penelitian terdahulu

Jauh sebelum diterbitkannya IFRS 16 tentang: *Leases*, Imhoff *et al.* pada tahun 1991 pernah meneliti dampak kapitalisasi sewa operasi pada 14 perusahaan dari tujuh industri yang berbeda dengan tahun fiskal 1987. Hasil penelitian Imhoff *et al.* (1991) membuktikan bahwa sewa operasi, secara material dapat berdampak pada keterbandingan rasio keuangan antar perusahaan. Penelitian tersebut berfokus pada dampak kapitalisasi pada laporan posisi keuangan. Sedangkan, dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan laba dianggap minimal sehingga diabaikan dalam perhitungan rasio tersebut.

Pada tahun 1997, Imhoff *et al.* mencoba mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, yaitu Imhoff *et al.* (1991) dengan menambahkan pertimbangan dampak kapitalisasi sewa terhadap laporan laba-rugi. Imhoff *et al.* (1997), dengan menggunakan *Southwest Airlines* sebagai objek analisis, membuktikan bahwa sewa operasi dapat berdampak substansial terhadap penilaian profitabilitas (ROA dan ROE).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wong & Joshi (2015) meneliti dampak implementasi IFRS 16 dengan mengikuti pendekatan kapitalisasi sewa Imhoff *et al.* (1991) pada berbagai sektor industri di Australia. Wong & Joshi (2015) melalui studinya menemukan bahwa laporan keuangan akan mengalami perubahan secara signifikan ketika semua aset dan liabilitas sewa dikapitalisasi. Rasio profitabilitas (ROA dan ROE) maupun *leverage* (D/A dan D/E) juga mengalami perubahan yang signifikan.

Ozturk & Sercemeli (2016) melakukan studi kasus pada *Pegasus Airline* di Turki dengan topik yang serupa dengan penelitian-penelitian di atas. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh Ozturk & Sercemeli (2016) menunjukkan bahwa kapitalisasi sewa pada *Pegasus Airline*, dengan menggunakan tahun buku 2015, mengakibatkan kenaikan D/E dan ROE, serta penurunan D/A dan ROA.

PSAK 73 merupakan standar akuntansi yang baru diwajibkan untuk diterapkan mulai atau setelah tanggal 1 Januari 2020 sehingga belum banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik ini. Peneliti menemukan dua studi di Indonesia yang telah membahas analisis dampak implementasi PSAK 73 yaitu Kurniawan (2018) dan Tirani (2018).

Kurniawan (2018) meneliti dampak PSAK 73 pada industri retail. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan pada rasio ROA dan ROE, baik dengan pendekatan retrospektif maupun kumulatif. Selain itu, terjadi peningkatan D/A dan D/E sebesar 20% dan 93%.

Tirani (2018) meneliti dampak PSAK 73 pada industri penerbangan dan hanya menggunakan satu perusahaan saja yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. Hasil implementasi dengan pendekatan kumulatif (dengan kondisi perusahaan yang sedang rugi) mengakibatkan jumlah aset naik sebesar 115% dan ekuitas turun sebesar 80%. Pendekatan tersebut juga mengakibatkan ROA dan D/A naik sebesar 53,4% dan 82,6%, serta 19 kali kenaikan D/E. Berlawanan dengan hal tersebut, ROE turun sebesar 148%.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang tergolong dalam industri pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kapitalisasi konstruktif yang dikembangkan oleh Imhoff *et al.* (1991). Penelitian ini merupakan studi komparatif yang akan membandingkan perlakuan akuntansi dari dua aturan sewa yang berbeda, yaitu aturan lama (PSAK 30) dengan aturan baru (PSAK 73). Peneliti menggunakan cara praktis sesuai PSAK 73 yaitu pendekatan retrospektif modifikasian (dengan dampak kumulatif) dalam melakukan proses transisi. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kemungkinan dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan serta rasio keuangan dari industri pengolahan, sementara itu, dampak sesungguhnya belum dapat diketahui hingga perusahaan benar-benar telah menerapkan aturan baru ini, yaitu mulai tahun buku 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti antara lain peraturan akuntansi (PSAK 30, PSAK 73, IFRS 16, dan peraturan lain yang terkait), laporan tahunan perusahaan yang diunduh dari situs idx.co.id, buku, jurnal, skripsi, dan beberapa sumber lainnya.

Teknik Analisis Data

Tahapan Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Mengumpulkan data yang relevan
Data yang akan dianalisis didapat dari laporan keuangan perusahaan. Data utama yang dibutuhkan adalah data mengenai sewa. Namun, karena adanya keterbatasan terkait ketersediaan data, proses implementasi perlu dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi.
2. Melakukan proses implementasi PSAK 73, dengan cara:
 - a. Menentukan beberapa asumsi untuk keperluan perhitungan.
 - b. Mengestimasi nilai aset dan nilai liabilitas yang belum tercatat.
 - c. Menyesuaikan informasi yang tersaji pada laporan posisi keuangan.
3. Menilai dampak implementasi PSAK 73 terhadap laporan keuangan dan rasio keuangan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 73, yang telah dipaparkan dalam BAB 2. Seluruh sewa, sesuai PSAK 73, perlu diakui oleh penyewa sebagai aset dan liabilitas. Hal tersebut mengakibatkan perlunya pengukuran nilai aset dan nilai liabilitas yang belum tercatat yang muncul dari sewa yang sebelumnya masuk dalam sewa operasi. Pengukuran liabilitas, sesuai PSAK 73, pada tahap awal perlu ditentukan atas dasar nilai kini dari sisa nilai pembayaran sewa di masa depan. Peneliti perlu mengasumsikan tingkat suku bunga inkremental serta total sisa masa manfaat aset yang disewa dalam menentukan nilai kini karena informasi tersebut tidak diungkapkan oleh perusahaan.

Selain liabilitas sewa, besarnya porsi aset juga perlu diukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang disarankan oleh Imhoff *et al.* (1991) dalam mengukur besarnya aset. Hubungan antara aset dan liabilitas, dengan pendekatan Imhoff *et al.* (1991), diukur berdasarkan kerangka waktu (*time frame*). Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti perlu membuat asumsi mengenai sisa masa sewa serta total masa sewa. Penentuan proporsi aset, dengan mengacu pada mekanisme oleh Imhoff *et al.* (1991), dapat diukur dengan formula berikut:

$$\text{Keterangan: } \frac{PV_A}{PV_L} = \frac{RL}{TL} \times \frac{PVAF_{\%r, TL}}{PVAF_{\%r, RL}}$$

PV_A = Nilai kini dari aset yang belum dicatat

PV_L = Nilai kini dari liabilitas yang belum dicatat

RL = Sisa masa sewa

TL = Total masa sewa

$PVAF$ = Nilai kini (*annuity factor*)

$\%r$ = Suku bunga

Selanjutnya untuk mengukur besarnya dampak implementasi PSAK 73, peneliti menggunakan beberapa rasio berikut:

Tabel 3.1. Rasio Keuangan

Rasio	Pembilang	Penyebut
D/A	<i>Debt</i>	<i>Assets</i>
D/E	<i>Debt</i>	<i>Equity</i>
ROA	<i>Net Income</i>	<i>Assets</i>
ROE	<i>Net Income</i>	<i>Equity</i>

Sumber: Kieso *et al.* (2014)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian terdahulu, di antaranya oleh Imhoff *et al.* (1991), Imhoff *et al.* (1997), Wong & Joshi (2015), Ozturk & Sercemeli (2016), Kurniawan (2018), dan Tirani (2018), juga menggunakan rasio-rasio tersebut dalam menilai dampak kapitalisasi sewa terhadap kinerja keuangan.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Industri pengolahan adalah bidang usaha yang kegiatannya mengubah suatu bahan atau komponen, baik secara fisik maupun kimia, menjadi suatu produk baru (Badan Pusat Statistik, 2015). Jumlah industri pengolahan yang tercatat dalam *IDX Statistics* tahun 2018 adalah sebanyak 167 perusahaan. Penentuan menentukan objek penelitian secara ringkas dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Pemilihan Objek Penelitian

Industri Pengolahan yang tercatat di BEI Tahun 2018	Jenis Industri	Perusahaan yang Mengungkapkan Komitmen Sewa Operasi
71	<i>basic industry and chemicals</i>	2
46	<i>miscellaneous industry</i>	1
50	<i>consumer goods industry</i>	3
167		6

Sumber: data dari *IDX Statistics* 2018 (IDX, 2018) yang diolah oleh peneliti
Perusahaan yang tidak mengungkapkan komitmen sewa operasi dikeluarkan dari objek penelitian karena tidak memungkinkan untuk dapat diteliti. Ada enam perusahaan yang terpilih sebagai objek penelitian, yaitu PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) dan PT Semen Indonesia Persero Tbk (SMGR) dari *basic industry and chemicals*, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA), dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dari *consumer goods industry*, serta PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) dari *miscellaneous industry*.

Proses Implementasi PSAK 73

Mengidentifikasi Data Mengenai Komitmen Sewa Operasi

Peneliti memerlukan informasi terkait perjanjian pembayaran sewa operasi di masa depan untuk dapat mengukur besarnya aset maupun liabilitas yang belum dicatat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Data tersebut dapat diperoleh dari informasi mengenai komitmen sewa operasi yang tersedia pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dari tiap-tiap perusahaan. Berikut adalah data mengenai komitmen sewa operasi per 31 Desember 2018 yang dimiliki oleh keenam perusahaan tersebut.

Tabel 4.2. Komitmen Sewa Operasi

Komitmen Sewa Operasi 31 Desember 2018						
Akan berakhir:	SMGR	HMSP	RMBA	UNVR	POLY	CTBN
	(dalam jutaan Rp)			(dalam US\$)		
dalam 1 tahun	Rp 4.379	Rp 205.300	Rp 92.557	Rp 89.997	\$ 261.342	\$ 498.088
1--5 tahun	Rp 16.697	Rp 314.145	Rp 164.460	Rp 218.993	\$ 937.332	\$ 1.503.549
lebih dari 5 tahun	Rp 116.880	Rp -	Rp -	Rp -	\$ 1.823.078	\$ 280.000
Total	Rp 137.956	Rp 519.445	Rp 257.017	Rp 308.990	\$ 3.021.752	\$ 2.281.637

Sumber: data perusahaan yang diolah oleh peneliti

Perjanjian pembayaran sewa yang disajikan oleh setiap perusahaan dalam Tabel 4.2. dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perjanjian yang akan berakhir dalam satu tahun, antara satu sampai lima tahun, serta lebih dari lima tahun. Berdasarkan informasi yang tersaji dalam Tabel 4.2., dapat diketahui bahwa sebagian perusahaan, yaitu HMSP, RMBA, dan UNVR, tidak memiliki perjanjian pembayaran sewa dengan jangka waktu lebih dari lima tahun. Selain adanya perbedaan jangka waktu perjanjian sewa, nilai dari komitmen sewa pada masing-masing perusahaan juga bervariasi.

Estimasi Tingkat Suku Bunga

Peneliti menggunakan asumsi tingkat suku bunga yang sama untuk semua perusahaan karena tarif bunga implisit maupun inkremental dari sewa yang dimiliki keenam perusahaan tersebut tidak dapat diperoleh. Tingkat bunga yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebesar 10%, tarif tersebut juga telah digunakan dalam penelitian terdahulu oleh Imhoff *et al.* (1991), Wong & Joshi (2015), serta Ozturk & Sercemeli (2016). Mereka menggunakan tarif 10% dengan alasan yang sama dengan peneliti, yaitu tidak dapat diketahuinya tingkat bunga terkait dengan sewa yang dimiliki oleh perusahaan objek penelitian mereka. Ozturk & Sercemeli (2016) dan Wong & Joshi (2015) mengikuti penelitian-penelitian sebelumnya yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dijadikan acuan mereka (dengan topik yang serupa) yang juga menetapkan tingkat bunga sebesar 10%. Dasar penetapan tarif 10% tersebut pertama kali diasumsikan oleh Imhoff *et al.* (1991) dengan pertimbangan bahwa tarif yang sama juga digunakan oleh *Standard & Poors* (S&P) dalam mengestimasi nilai kini dari komitmen sewa operasi untuk tujuan *review* standar peringkat obligasi (Imhoff *et al.*, 1997).

Estimasi Jumlah Liabilitas yang Belum Tercatat

Liabilitas yang belum tercatat (yang timbul dari kapitalisasi sewa operasi), sesuai PSAK 73, diukur berdasarkan nilai kini dari nilai sisa komitmen sewa operasi di masa depan. Informasi yang perlu diketahui untuk dapat menghitung nilai kini adalah besarnya rata-rata total masa sewa dan sisa masa sewa. Rata-rata total masa sewa tidak diungkapkan oleh perusahaan sehingga oleh peneliti diasumsikan durasinya adalah sama untuk semua perusahaan, mengikuti Imhoff *et al.* (1991), yaitu selama 25 tahun, kecuali untuk UNVR, yang mengungkapkan total masa sewa selama 10 tahun.

Sisa masa sewa durasinya bervariasi pada setiap perusahaan. UNVR mengungkapkan sisa masa sewa hingga akhir tahun 2021, sementara POLY mengungkapkan sisa masa sewa hingga akhir tahun 2040. HMSP dan RMBA memiliki sisa masa sewa hingga akhir tahun 2023. Sementara itu, untuk SMGR dan CTBN, sisa masa sewanya diasumsikan akan berakhir pada tahun 2033 atau selama 15 tahun, mengikuti Imhoff *et al.* (1991), karena sisa masa sewanya tidak dapat diketahui. Tabel 4.3. berikut menyajikan perhitungan nilai kini yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan Imhoff *et al.* (1991).

Tabel 4.3. Estimasi Liabilitas yang Belum Tercatat

SMGR (dalam jutaan)					
Tahun	Pembayaran Sewa Minimum	x	10% PV factor	=	Nilai Kini
2019	Rp 4.379	x	0,9091	=	Rp 3.981
2020	Rp 4.174	x	0,8264	=	Rp 3.450
2021	Rp 4.174	x	0,7513	=	Rp 3.136
2022	Rp 4.174	x	0,6830	=	Rp 2.851
2023	Rp 4.174	x	0,6209	=	Rp 2.592
2024-2033	Rp 116.880	x	6,1446	=	Rp 718.180

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Estimasi liabilitas yang belum tercatat					Rp 734.190
HMSP (dalam jutaan)					
Tahun	Pembayaran Sewa Minimum	x	10% PV factor	=	Nilai Kini
2019	Rp 205.300	x	0,9091	=	Rp 186.638
2020	Rp 78.536	x	0,8264	=	Rp 64.902
2021	Rp 78.536	x	0,7513	=	Rp 59.004
2022	Rp 78.536	x	0,6830	=	Rp 53.640
2023	Rp 78.536	x	0,6209	=	Rp 48.763
Estimasi liabilitas yang belum tercatat					Rp 412.948
RMBA (dalam jutaan)					
Tahun	Pembayaran Sewa Minimum	x	10% PV factor	=	Nilai Kini
2019	Rp 92.557	x	0,9091	=	Rp 84.144
2020	Rp 41.115	x	0,8264	=	Rp 33.977
2021	Rp 41.115	x	0,7513	=	Rp 30.890
2022	Rp 41.115	x	0,6830	=	Rp 28.082
2023	Rp 41.115	x	0,6209	=	Rp 25.528
Estimasi liabilitas yang belum tercatat					Rp 202.621
UNVR (dalam jutaan)					
Tahun	Pembayaran Sewa Minimum	x	10% PV factor	=	Nilai Kini
2019	Rp 89.997	x	0,9091	=	Rp 81.816
2020	Rp 109.497	x	0,8264	=	Rp 90.488
2021	Rp 109.497	x	0,7513	=	Rp 82.265
Estimasi liabilitas yang belum tercatat					Rp 254.569
POLY					
Tahun	Pembayaran Sewa Minimum	x	10% PV factor	=	Nilai Kini
2019	\$ 261.342	x	0,9091	=	\$ 237.586
2020	\$ 234.333	x	0,8264	=	\$ 193.653
2021	\$ 234.333	x	0,7513	=	\$ 176.054
2022	\$ 234.333	x	0,6830	=	\$ 160.049
2023	\$ 234.333	x	0,6209	=	\$ 145.497
2024-2040	\$ 1.823.078	x	8,0216	=	\$ 14.624.002
Estimasi liabilitas yang belum tercatat					\$ 15.536.842
CTBN					
Tahun	Pembayaran Sewa Minimum	x	10% PV factor	=	Nilai Kini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2019	\$ 498.088	x	0,9091	=	\$ 452.812
2020	\$ 375.887	x	0,8264	=	\$ 310.633
2021	\$ 375.887	x	0,7513	=	\$ 282.404
2022	\$ 375.887	x	0,6830	=	\$ 256.731
2023	\$ 375.887	x	0,6209	=	\$ 233.388
2024-2033	\$ 280.000	x	6,1446	=	\$ 1.720.488
Estimasi liabilitas yang belum tercatat					\$ 3.256.457

Sumber: data perusahaan yang diolah oleh peneliti

Pembayaran sewa minimum untuk tiap-tiap tahun yang disajikan dalam tabel tersebut diperoleh dari informasi pada tabel sebelumnya (Tabel 4.2.). Pembayaran sewa untuk tahun 2019 diperoleh dari data kelompok sewa yang akan berakhir dalam satu tahun (lihat Tabel 4.2.). Pembayaran sewa antara satu sampai lima tahun oleh peneliti diasumsikan besarnya sama untuk setiap tahunnya karena besarnya sisa pembayaran sewa tidak dijabarkan secara tahun per tahun oleh perusahaan. Asumsi yang serupa juga digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu oleh Ozturk & Sercemeli (2016), Kurniawan (2018), dan Tirani (2018). Pembayaran sewa yang digunakan dalam perhitungan pada Tabel 4.3. bagi SMGR untuk tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 4.174.000.000, yang diperoleh dari Rp 16.697.000.000/4 (lihat Tabel 4.2.). Pembayaran sewa bagi HMSP untuk tahun 2020 sampai 2023, masing-masing adalah sebesar Rp 78.536.000.000 yang diperoleh dari Rp 314.145.000.000/4 (lihat Tabel 4.2.). Pembayaran sewa bagi RMBA untuk tahun 2020 sampai 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 41.115.000.000 yang diperoleh dari Rp 164.460.000.000/4 (lihat Tabel 4.2.). Pembayaran sewa bagi UNVR untuk tahun 2020 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 109.497.000.000 yang diperoleh dari Rp 218.993.000.000/2 (lihat Tabel 4.2.). Pembayaran sewa bagi POLY untuk tahun 2020 sampai 2023 masing-masing adalah sebesar \$ 234.333 yang diperoleh dari \$ 937.332/4 (lihat Tabel 4.2.). Pembayaran sewa bagi CTBN untuk tahun 2020 sampai 2023 masing-masing adalah sebesar \$ 375.887 yang diperoleh dari \$ 1.503.549/4 (lihat Tabel 4.2.). Estimasi liabilitas yang belum tercatat yang ditunjukkan dalam Tabel 4.3. di atas diperoleh dari perhitungan komitmen pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat suku bunga 10%.

Estimasi Jumlah Aset yang Belum Tercatat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penentuan jumlah aset yang belum tercatat, dilakukan oleh peneliti dengan mengikuti cara yang dilakukan oleh Imhoff *et al.* (1991), yaitu dengan menggunakan proporsi tertentu atas jumlah liabilitas yang belum tercatat. Informasi mengenai total masa sewa maupun sisa masa sewa diperlukan dalam perhitungan proporsi tersebut. Peneliti telah memaparkan di sub-bab sebelumnya bahwa total masa sewa diasumsikan sama untuk semua perusahaan yaitu selama 25 tahun. Sementara itu, sisa masa sewa durasinya bervariasi antar perusahaan sesuai dengan informasi komitmen sewa operasi yang diungkapkan. Proporsi aset untuk tiap-tiap perusahaan pada berbagai masa sewa serta berbagai tingkat penggunaan sewa, dengan memakai tarif bunga sebesar 10%, dapat ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4.4. Perhitungan Proporsi Aset

Kode Perusahaan	Total Masa Sewa	Sisa Masa Sewa	Rasio Aset : Liabilitas
SMGR	25 tahun	15 tahun	$\frac{15}{25} \times \frac{PVA_{10\%,25}}{PVA_{10\%,15}} = \frac{15}{25} \times \frac{9,077}{7,6061} = 72\%$
HMSB	25 tahun	5 tahun	$\frac{5}{25} \times \frac{PVA_{10\%,25}}{PVA_{10\%,5}} = \frac{5}{25} \times \frac{9,077}{3,7908} = 48\%$
RMBA	25 tahun	5 tahun	$\frac{5}{25} \times \frac{PVA_{10\%,25}}{PVA_{10\%,5}} = \frac{5}{25} \times \frac{9,077}{3,7908} = 48\%$
UNVR	10 tahun	3 tahun	$\frac{3}{10} \times \frac{PVA_{10\%,10}}{PVA_{10\%,3}} = \frac{3}{10} \times \frac{6,1446}{2,4869} = 74\%$
POLY	25 tahun	22 tahun	$\frac{22}{25} \times \frac{PVA_{10\%,25}}{PVA_{10\%,22}} = \frac{22}{25} \times \frac{9,077}{8,7715} = 91\%$
CTBN	25 tahun	15 tahun	$\frac{15}{25} \times \frac{PVA_{10\%,25}}{PVA_{10\%,15}} = \frac{15}{25} \times \frac{9,077}{7,6061} = 72\%$

Sumber: data perusahaan yang diolah oleh peneliti

Nilai buku dari aset sewa pada dasarnya akan mengalami penurunan lebih cepat dari pada nilai buku liabilitas sewa karena pada setiap periode, aset sewa biasanya didepresiasi dengan dasar garis lurus sedangkan liabilitas sewa berkurang sebesar nilai pembayaran sewa dan bertambah karena adanya bunga (IASB, 2016). Akibatnya, meskipun nilai aset dan liabilitas pada awal dan akhir masa sewa adalah sama, umumnya nilai aset akan lebih rendah dari pada nilai liabilitas sepanjang masa sewa (IASB, 2016).

Penyesuaian Laporan Posisi Keuangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penerapan PSAK 73 pada industri pengolahan mengakibatkan terjadinya perubahan pada komponen aset, liabilitas, serta ekuitas perusahaan. Aset dan liabilitas akan mengalami kenaikan, sementara ekuitas akan mengalami penurunan. Penyesuaian atas penerapan PSAK 73 yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dalam Tabel 4.5. berikut.

Tabel 4.5. Penyesuaian Laporan Posisi Keuangan

SMGR (dalam jutaan)			
Aset Aset hak guna yang belum tercatat (b)	Rp 528.617	Liabilitas Liabilitas sewa yang belum tercatat (a)	Rp 734.190
		Ekuitas Ekuitas pemegang saham (c)	Rp (205.573)
	<u>Rp 528.617</u>		<u>Rp 528.617</u>
HMSP (dalam jutaan)			
Aset Aset hak guna yang belum tercatat (b)	Rp 198.215	Liabilitas Liabilitas sewa yang belum tercatat (a)	Rp 412.948
		Ekuitas Ekuitas pemegang saham (c)	Rp (214.733)
	<u>Rp 198.215</u>		<u>Rp 198.215</u>
RMBA (dalam jutaan)			
Aset Aset hak guna yang belum tercatat (b)	Rp 97.258	Liabilitas Liabilitas sewa yang belum tercatat (a)	Rp 202.621
		Ekuitas pemegang saham Ekuitas pemegang saham (c)	Rp (105.363)
	<u>Rp 97.258</u>		<u>Rp 97.258</u>
UNVR (dalam jutaan)			
Aset Aset hak guna yang belum tercatat (b)	Rp 188.381	Liabilitas Liabilitas sewa yang belum tercatat (a)	Rp 254.569
		Ekuitas Ekuitas pemegang saham (c)	Rp (66.188)
	<u>Rp 188.381</u>		<u>Rp 188.381</u>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

POLY			
Aset		Liabilitas	
Aset hak guna yang belum tercatat (b)	\$ 14.138.527	Liabilitas sewa yang belum tercatat (a)	\$ 15.536.842
		Ekuitas	
		Ekuitas pemegang saham (c)	\$ (1.398.316)
	<u>\$ 14.138.527</u>		<u>\$ 14.138.527</u>
CTBN			
Aset		Liabilitas	
Aset hak guna yang belum tercatat (b)	\$ 2.344.649	Liabilitas sewa yang belum tercatat (a)	\$ 3.256.457
		Ekuitas	
		Ekuitas pemegang saham (c)	\$ (911.808)
	<u>\$ 2.344.649</u>		<u>\$ 2.344.649</u>
Keterangan:			
(a) Lihat Tabel 6			
(b) Proporsi aset hak guna (lihat Tabel 7) x liabilitas sewa (a)			
(c) Liabilitas sewa (a) - aset hak guna (b)			

Sumber: data perusahaan yang diolah oleh peneliti

Perubahan yang terjadi pada liabilitas ditentukan berdasarkan hasil perhitungan estimasi jumlah liabilitas yang belum tercatat (lihat Tabel 4.3.). Perubahan pada aset ditentukan sesuai besarnya proporsi aset (lihat Tabel 4.4.) dikalikan dengan nilai liabilitas sewa. Implementasi PSAK 73 mengakibatkan terjadinya peningkatan aset sejumlah: Rp 528.617.000.000 (72% x Rp 734.190.000.000) bagi SMGR; Rp 198.215.000.000 (48% x Rp 412.948.000.000) bagi HMSM; Rp 97.258.000.000 (48% x Rp 202.621.000.000) bagi RMBA; Rp 188.381.000.000 (74% x Rp 254.569.000.000) bagi UNVR; \$ 14.138.527 (91% x \$ 15.536.842) bagi POLY; dan \$ 2.344.649 (72% x \$ 3.256.457) bagi CTBN. Perubahan yang terjadi pada ekuitas merupakan selisih antara nilai liabilitas sewa dengan nilai aset hak guna yang belum tercatat. Implementasi PSAK 73 mengakibatkan terjadinya penurunan ekuitas pada keenam perusahaan.

Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Laporan Keuangan

Perubahan yang terjadi pada komponen laporan keuangan atas implementasi PSAK 73 pada masing-masing perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 4.6. berikut. Nilai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan laba (rugi) bersih sebelum implementasi (*as reported*) diidentifikasi dari jumlah yang disajikan oleh masing-masing perusahaan dalam laporan keuangannya. Besarnya nilai komponen laporan keuangan setelah implementasi (*adjusted*) diperoleh dari hasil penyesuaian dengan PSAK 73 (lihat Tabel 4.5.) yang telah dilakukan oleh peneliti.

Tabel 4.6. Perubahan Komponen Laporan Keuangan

SMGR (dalam jutaan Rp)			
Komponen	<i>As reported</i>	<i>Adjustment</i>	<i>Adjusted</i>
Total aset	Rp 51.155.890	Rp 528.617	Rp 51.684.507
Total liabilitas	Rp 18.419.595	Rp 734.190	Rp 19.153.785
Total ekuitas	Rp 32.736.296	Rp (205.573)	Rp 32.530.722
Laba (rugi) bersih	Rp 3.085.704		Rp 3.085.704
HMSB (dalam jutaan Rp)			
Komponen	<i>As reported</i>	<i>Adjustment</i>	<i>Adjusted</i>
Total aset	Rp 46.602.420	Rp 198.215	Rp 46.800.635
Total liabilitas	Rp 11.244.167	Rp 412.948	Rp 11.657.115
Total ekuitas	Rp 35.358.253	Rp (214.733)	Rp 35.143.520
Laba (rugi) bersih	Rp 13.538.418		Rp 13.538.418
RMBA (dalam jutaan Rp)			
Komponen	<i>As reported</i>	<i>Adjustment</i>	<i>Adjusted</i>
Total aset	Rp 14.879.589	Rp 97.258	Rp 14.976.847
Total liabilitas	Rp 6.513.618	Rp 202.621	Rp 6.716.239
Total ekuitas	Rp 8.365.971	Rp (105.363)	Rp 8.260.608
Laba (rugi) bersih	Rp (608.463)		Rp (608.463)
UNVR (dalam jutaan Rp)			
Komponen	<i>As reported</i>	<i>Adjustment</i>	<i>Adjusted</i>
Total aset	Rp 19.522.970	Rp 188.381	Rp 19.711.351
Total liabilitas	Rp 11.944.837	Rp 254.569	Rp 12.199.406
Total ekuitas	Rp 7.578.133	Rp (66.188)	Rp 7.511.945
Laba (rugi) bersih	Rp 9.109.445		Rp 9.109.445
POLY (dalam USD)			
Komponen	<i>As reported</i>	<i>Adjustment</i>	<i>Adjusted</i>
Total aset	\$ 238.246.828	\$ 14.138.527	\$ 252.385.355
Total liabilitas	\$ 1.167.672.439	\$ 15.536.842	\$ 1.183.209.281

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Total ekuitas	\$ (929.425.611)	\$ (1.398.316)	\$ (930.823.927)
Laba (rugi) bersih	\$ 12.832.260		\$ 12.832.260
CTBN (dalam USD)			
Komponen	<i>As reported</i>	<i>Adjustment</i>	<i>Adjusted</i>
Total aset	\$ 155.653.317	\$ 2.344.649	\$ 157.997.966
Total liabilitas	\$ 56.917.064	\$ 3.256.457	\$ 60.173.521
Total ekuitas	\$ 98.736.253	\$ (911.808)	\$ 97.824.445
Laba (rugi) bersih	\$ (5.794.754)		\$ (5.794.754)

Sumber: data perusahaan yang diolah oleh peneliti

Persentase perubahan nilai komponen laporan keuangan atas implementasi PSAK 73 dapat dilihat pada Tabel 4.7. berikut. Total aset dan total liabilitas pada keenam perusahaan rata-rata mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,75% dan 3,33%. Sedangkan, total ekuitas rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,74%.

Tabel 4.7. Dampak terhadap Komponen Laporan Keuangan

Komponen	Perusahaan	Sebelum Implementasi (as reported)	Setelah Implementasi (adjusted)	% Perubahan	% Perubahan Rata-rata
Total aset	SMGR	Rp 51.155.890	Rp 51.684.507	+1,03%	+1,75%
	HMSP	Rp 46.602.420	Rp 46.800.635	+0,43%	
	RMBA	Rp 14.879.589	Rp 14.976.847	+0,65%	
	UNVR	Rp 19.522.970	Rp 19.711.351	+0,96%	
	POLY	\$ 238.246.828	\$ 252.385.355	+5,93%	
	CTBN	\$ 155.653.317	\$ 157.997.966	+1,51%	
Total liabilitas	SMGR	Rp 18.419.595	Rp 19.153.785	+3,99%	+3,33%
	HMSP	Rp 11.244.167	Rp 11.657.115	+3,67%	
	RMBA	Rp 6.513.618	Rp 6.716.239	+3,11%	
	UNVR	Rp 11.944.837	Rp 12.199.406	+2,13%	
	POLY	\$ 1.167.672.439	\$ 1.183.209.281	+1,33%	
	CTBN	\$ 56.917.064	\$ 60.173.521	+5,72%	
Total ekuitas	SMGR	Rp 32.736.296	Rp 32.530.722	-0,63%	-0,74%
	HMSP	Rp 35.358.253	Rp 35.143.520	-0,61%	
	RMBA	Rp 8.365.971	Rp 8.260.608	-1,26%	
	UNVR	Rp 7.578.133	Rp 7.511.945	-0,87%	
	POLY	\$ (929.425.611)	\$ (930.823.927)	-0,15%	
	CTBN	\$ 98.736.253	\$ 97.824.445	-0,92%	

Sumber: data perusahaan yang diolah oleh peneliti

Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Rasio Keuangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian sebelumnya oleh Wong & Joshi (2015), Ozturk & Sercemeli (2016), Kurniawan (2018), dan Tirani (2018) telah membuktikan adanya perubahan terhadap rasio D/A, D/E, ROA, maupun ROE sebagai dampak dari implementasi IFRS 16 maupun PSAK 73. Penelitian ini juga hendak mencari tahu dampak implementasi aturan baru tersebut terhadap rasio keuangan dari industri pengolahan di Indonesia. Perubahan rasio untuk masing-masing perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Dampak terhadap Rasio Keuangan

Rasio	Keterangan	Perusahaan					
		SMGR	HMSP	RMBA	UNVR	POLY	CTBN
D/A	Sebelum implementasi	36,01%	24,13%	43,78%	61,18%	490,11%	36,57%
	Setelah implementasi	37,06%	24,91%	44,84%	61,89%	468,81%	38,08%
	% perubahan	+2,92%	+3,23%	+2,44%	+1,16%	-4,35%	+4,15%
	% perubahan rata-rata	3,04%					
D/E	Sebelum implementasi	56,27%	31,80%	77,86%	157,62%	-125,63%	57,65%
	Setelah implementasi	58,88%	33,17%	81,30%	162,40%	-127,11%	61,51%
	% perubahan	+4,64%	+4,31%	+4,43%	+3,03%	-1,18%	+6,71%
	% perubahan rata-rata	4,05%					
ROA	Sebelum implementasi	6,03%	29,05%	-4,09%	46,66%	5,39%	-3,72%
	Setelah implementasi	5,97%	28,93%	-4,06%	46,21%	5,08%	-3,67%
	% perubahan	-1,02%	-0,42%	+0,65%	-0,96%	-5,60%	+1,48%
	% perubahan rata-rata	1,69%					
ROE	Sebelum implementasi	9,43%	38,29%	-7,27%	120,21%	-1,381%	-5,87%
	Setelah implementasi	9,49%	38,52%	-7,37%	121,27%	-1,379%	-5,92%
	% perubahan	+0,63%	+0,61%	-1,28%	+0,88%	+0,15%	-0,93%
	% perubahan rata-rata	0,75%					

Sumber: data perusahaan yang diolah oleh peneliti

Tabel 4.8. membandingkan besarnya rasio keuangan dari keenam perusahaan pada saat sebelum implementasi (*as reported*) dan setelah implementasi (*adjusted*). Rata-rata D/A mengalami peningkatan sebesar 3,04%. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya kenaikan total liabilitas yang lebih besar dari pada kenaikan total aset. Pengecualian terjadi pada POLY yang mengalami penurunan D/A sebesar 4,35%. Rata-rata D/E mengalami peningkatan yang lebih besar dari pada peningkatan rata-rata D/A, yaitu sebesar 4,05%. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya kenaikan total liabilitas dan sekaligus penurunan total ekuitas. Sama seperti D/A, pengecualian atas terjadinya peningkatan D/E ini juga terjadi pada POLY. Hal tersebut

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diakibatkan karena POLY pada tahun 2018 melaporkan ekuitas negatif (lihat Tabel 4.7.).

Rata-rata ROA mengalami penurunan sebesar 1,69%, yang diakibatkan oleh adanya peningkatan total aset. Hal sebaliknya justru terjadi pada RMBA dan CTBN yang sama-sama mengalami peningkatan ROA karena pada tahun 2018 kedua perusahaan tersebut mengalami rugi. Rata-rata ROE mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,75%, yang diakibatkan karena adanya penurunan total ekuitas. Pengecualian terjadi pada RMBA dan CTBN yang melaporkan rugi pada tahun 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi PSAK 73 pada industri pengolahan mengakibatkan perubahan pada laporan posisi keuangan dengan adanya kenaikan rata-rata aset maupun liabilitas, dan penurunan rata-rata ekuitas. Rasio keuangan seperti D/A, D/E, ROA, dan ROE juga mengalami perubahan, yang nilainya bervariasi pada setiap perusahaan. Rata-rata D/A dan D/E mengalami peningkatan, kecuali untuk perusahaan yang melaporkan ekuitas negatif. Perubahan pada ROA dan ROE dipengaruhi oleh laba (rugi) yang dilaporkan masing-masing perusahaan. Perusahaan yang melaporkan laba pada tahun 2018 mengalami penurunan ROA dan peningkatan ROE, hal sebaliknya justru terjadi pada perusahaan yang melaporkan rugi.

Kinerja keuangan perusahaan di industri pengolahan akan memburuk pada awal penerapan PSAK 73, yang disebabkan oleh adanya kapitalisasi sewa operasi. Namun, dengan diimplementasikannya PSAK 73 ini, gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan justru menjadi lebih *real* karena semua transaksi sewa akan tercantum dalam laporan posisi keuangan. Secara keseluruhan, implementasi PSAK 73 berdampak pada laporan keuangan maupun rasio keuangan pada industri pengolahan, akan tetapi nilainya tidak sebesar hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tirani (2018) dan Kurniawan (2018). Hal tersebut disebabkan karena di Indonesia, sewa operasi yang dimiliki oleh industri pengolahan nilainya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tidak sebesar sewa operasi yang dimiliki oleh industri penerbangan maupun industri retail.

Keterbatasan

1. Hanya ada enam dari total 167 industri pengolahan yang mengungkapkan komitmen sewa operasi mereka sehingga sisanya tidak dapat diteliti.
2. Informasi yang diungkapkan oleh masing-masing perusahaan terbatas sehingga analisis dilakukan dengan beberapa asumsi.
3. PSAK 73 baru akan diterapkan oleh perusahaan mulai tahun buku 2020 sehingga peneliti belum dapat menganalisis dampak implementasi sesungguhnya, oleh sebab itu, untuk keperluan analisis peneliti mengasumsikan perusahaan telah menerapkan implementasi pada tahun 2018.

Saran

1. Analisis pada industri yang berbeda dapat dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat diketahui dampak implementasi PSAK 73 pada tiap-tiap industri.
2. Penelitian selanjutnya dapat menilai dampak sesungguhnya dari PSAK 73 ketika perusahaan telah benar-benar melakukan implementasi, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan pada (atau setelah) tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015). *Perka BPS Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/website/fileMenu/Perka-KBLI-2015.pdf>
- Deloitte. (2016). *Leases-A Guide to IFRS 16* (Issue June).
- IAI. (2014). *PSAK 30: Sewa (revisi)*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-27-psak-30-sewa>
- IAI. (2017). *Draf Exposur PSAK 73 Sewa*. www.iaiglobal.or.id
- IAI. (2020). *Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*.
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>
- IASB. (2016a). *IASB Shines Light on Leases by Bringing Them onto The Balance*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sheet. <https://www.ifrs.org/news-and-events/2016/01/iasb-shines-light-on-leases-by-bringing-them-onto-the-balance-sheet/>

IASB. (2016b). IFRS 16 Leases - Effects Analysis. *International Financial Reporting Standard, January*, 104. <https://cdn.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf>

IDX. (2018). *IDX Statistics 2018* (Issue December). idx.co.id: <https://idx.co.id/media/4842/idx-annual-statistics-2018.pdf>

IFRS Foundation. (2017). *Why Global Accounting Standards?* <https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/>

Imhoff, E. A., Lipe, R. C., & Wright, D. W. (1991). Operating Leases : Impact of Constructive Capitalization. *Accounting Horizons*, 13.

Imhoff, E. A., Lipe, R. C., & Wright, D. W. (1997). Operating leases: Income effects of constructive capitalization. *Accounting Horizons*, 11(2), 12–32.

Jusup, A. H. (2011). *Dasar-dasar Akuntansi* (2nd ed.). AdMark.

Kieso, E. D., Weygandt, J. J., & Warfield, D. T. (2014). *Intermediate Accounting Second Edition* (J. Hollenbeck (ed.); IFRS). Wiley Plus.

Kurniawan, A. B. (2018). *The Impact of PSAK 73 Implementation towards Financial Statements and Key Financial Ratios of Retail Companies in Indonesia* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Maxwell, J. R. (1990). *Introductory Accounting: Principles and Practice* (2nd ed.). Prentice Hall.

Ozturk, M., & Sercemeli, M. (2016). Impact of New Standard “IFRS 16 Leases” on Statement of Financial Position and Key Ratios: A Case Study on an Airline Company in Turkey. *Business and Economics Research Journal*, 7(4), 143–143. <https://doi.org/10.20409/berj.2016422344>

Price, J. E., Haddock, M. D., & Farina, M. J. (2012). *College Accounting* (13th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Tahtah, J., & Roelofsen, E. (2016). A Study on The Impact of Lease Capitalisation IFRS 16: The New Leases Standard. In *PwC report* (Issue February). www.pwc.com

Tirani, U. G. (2018). *Analisis Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Laporan Posisi Keuangan dan Rasio Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Wong, K., & Joshi, M. (2015). The impact of lease capitalisation on financial statements and key ratios: Evidence from Australia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 9(3), 27–44. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i3.3>